

ANALISIS PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Susyanti¹, Tri Utami²

^{1,2}Universitas Widya Dharma, Jawa Tengah, Indonesia

[¹susyanti@unwidha.ac.id](mailto:susyanti@unwidha.ac.id)

[²triutami@unwidha.ac.id](mailto:triutami@unwidha.ac.id)

<http://dx.doi.org/>

ABSTRACT

Analysis of village problems is critical because the initial stage in Village Financial Management is planning. Mapping village problems guide village financial management powers (PKPKD) and village financial management (PPKD) executors in planning village development. This study analyzes problems in village financial management, especially in village administration. The subjects in this study were 52 Heads of General Affairs and Planning in Klaten Regency. Data was obtained by giving a questionnaire to the subject. The questionnaire contains a list of sub-sectors and activities. Subjects were asked to write down the problems while making village development plans, especially in village administration. Data is analyzed by identifying each problem and entering it into the appropriate activity parameters. The study results show that the Village Administration Sector has potential problems related to the Sub-Sectors of Population Administration, Civil Registration, Statistics, Archives, Governance, Planning, Finance, and Reporting.

Keywords: *Village Government, Village Finance, Village Reporting, Village Problems.*

ABSTRAK

Analisis masalah desa penting untuk dilakukan karena tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Pemetaan masalah desa akan memandu kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) dalam menyusun rencana pembangunan desa. Penelitian ini menganalisis permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Subjek dalam penelitian ini adalah 52 Kepala Umum dan Perencanaan yang ada di Kabupaten Klaten. Data diperoleh dengan cara pemberian angket kepada subyek. Angket berisi daftar sub bidang dan kegiatan. Subyek diminta untuk menuliskan permasalahan yang dihadapi selama membuat perencanaan pembagunan desa khususnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Data dianalisis dengan cara mengidentifikasi setiap masalah dan memasukkannya ke dalam parameter kegiatan yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai potensi masalah yang berhubungan dengan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Kearsipan, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

Kata kunci: *Pemerintahan Desa, Keuangan Desa, Pelaporan Desa, Masalah Desa.*

PENDAHULUAN

Segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat dipenuhi oleh desa dan pemerintah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada desa untuk melakukan tata kelola pemerintahan desa (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) (Indonesia, 2014). Tujuan otonomi desa tersebut adalah untuk pemerataan pelaksanaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa (Aziz, 2016). Dengan demikian, kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisir (Pamungkas, 2019). Pemerintah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia (Arfiansyah, 2020; Bukhari, 2021). Pemerintah memberikan dana desa yang nilainya cukup besar agar bermanfaat dalam pembangunan desa. Tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan dan masuk di dalamnya adalah proses penganggaran.

Pengelolaan keuangan desa akan berjalan dengan baik jika perencanaannya dilakukan dengan baik (Subandi & Musriadi, 2020). Perencanaan pembangunan desa tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Perencanaan pembangunan desa dilatarbelakangi oleh perlunya sebuah perencanaan yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat; keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menggali dan merumuskan permasalahan dan potensi masalah, prioritas permasalahan, tindak lanjut yang layak, sehingga tercipta rencana kegiatan yang tepat. Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.

Merujuk pada penelitian terdahulu, terdapat berbagai masalah dalam pembuatan rencana pembangunan desa. Permasalahan pertama terkait dengan tidak sinkronnya antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah (Arifin,

2018; Jamaluddin, *et al.*, 2018; Zuliyah, 2010). Ketidakselarasan rencana pembangunan desa dan daerah dapat mengakibatkan tertundanya pembangunan daerah dan desa. Kedua, desa tidak melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan pembangunan desa (Roza & S, 2017; Setyaningrum & Wisnaeni, 2019; Wiguna, Dewi & Angelia, 2017). Tidak dilibatkannya unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat bertentangan dengan asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Ketiadaan partisipasi dari unsur masyarakat juga menghambat proses pembangunan desa, karena kegiatan yang dilakukan menjadi tidak tepat sasaran. Ketiga, sering ditemui bahwa terjadi inkonsistensi dalam penjabaran tahunan RPJMDes ke dalam RKPDes (Subandi & Musriadi, 2020; Sukriono, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengambil pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu kajian (Nafidah & Anisa, 2017; Rivan & Maksum, 2019; Roza & S, 2017; Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Sudut pandang yang digunakan peneliti terdahulu sangat beragam, misalnya tentang tata kelola pemerintahan (Astuti & Yulianto, 2016; Wahyudi & Pancawati, 2018), transparansi pengelolaan keuangan desa (Ferarrow & Suprihanto, 2018; Ngakil & Kaukab, 2020; Sukmawati & Nurfitriani, 2019), akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Kumalasari & Riharjo, 2016; Ngakil & Kaukab, 2020; Sukmawati & Nurfitriani, 2019), pencegahan fraud (Desviana, Basri & Nasrizal, 2020; Saputra, *et al.*, 2019), system informasi dalam pengelolaan keuangan desa (Arfiansyah, 2020; Rivan & Maksum, 2019). Penelitian terdahulu berfokus pada hubungan kausalitas, dan masih terbatas sekali penelitian yang mengkaji secara kualitatif prioritas permasalahan desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini berupaya untuk memetakan permasalahan-permasalahan desa berdasarkan bidang, sub bidang dan kegiatan. Pemetaan ini penting untuk dilakukan karena tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Pemetaan masalah desa akan memandu kepala desa sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan membantu sekretaris desa, kasi dan kaur sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) dalam menyusun rencana pembangunan desa.

Rencana pembangunan desa sebaiknya memperhatikan prioritas di masing-masing bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Subandi & Musriadi, 2020; Sukriono, 2021). Masing-masing bidang tersebut terdiri dari sub-sub bidang, dan masing-masing sub bidang terdiri dari berbagai kegiatan. Banyaknya bidang-sub bidang-dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa memberikan potensi masalah yang berbeda-beda. Penelitian ini berupaya untuk memetakan permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah desa, khususnya para pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD). Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Secara lebih rinci tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan sub-bidang dan kegiatan apa saja yang paling berpotensi menjadi masalah di dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Jika dianalisis pada masing-masing kegiatan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang sering muncul dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil kependudukan dan potensi desa; penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa dan penyusunan dokumen keuangan desa; perlunya penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi Masyarakat. Pemetaan masalah desa penting untuk dilakukan karena akan menjadi dasar dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Sehingga dengan perencanaan yang baik, tahapan pengelolaan keuangan desa selanjutnya seperti pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban diharapkan dapat berjalan dengan baik pula. Secara ringkas, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 3 (tiga) cara. Pertama, hasil penelitian ini dapat membantu pemegang kekuasaan dan pelaksana pengelolaan keuangan desa dalam merumuskan RPJMDes dan RKPDes. Kedua, hasil penelitian ini dapat membantu desa dalam memetakan skala prioritas masalah yang harus

diselesaikan. Ketiga, Penelitian ini memperluas literatur akuntansi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Tiga tujuan utama dari pengelolaan keuangan desa adalah: 1) Sebagai suatu bentuk pengawalan keuangan; 2) Agar tujuan pembangunan desa tercapai; 3) Meningkatkan kesejahteraan desa. Pengelolaan keuangan desa mempunyai tiga asas, yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada pelaksana. Pelaksana pengelolaan keuangan desa terdiri dari sekretaris desa, kasi dan kaur. Tupoksi dari kepala desa, sekretaris desa, kaur dan kasi dalam pengelolaan keuangan desa secara rinci tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)..

Soleh & Rochmansjah (2014) menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan desa berdasarkan sifat pengelolaannya terdiri dari dua, yaitu dilakukan secara langsung dan secara terpisah, secara berturut-turut yaitu Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan pengelolaan keuangan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara terpisah oleh BUMDes dimaksudkan untuk menjadi penggerak perekonomian desa dan sebagai sumber pendapatan desa (Agunggunanto, *et al.*, 2016; Suleman, *et al.*, 2020). Dengan demikian, potensi masalah yang dihadapi desa juga dapat bersumber baik dari

perencanaan desa itu sendiri ataupun BUMDes. Perencanaan keuangan tahunan desa bersumber dari perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes kemudian dijabarkan dalam RKPDes tahunan, selanjutnya RKPDes menjadi acuan munculnya pendapatan dan belanja dalam APBDes (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Berbagai penelitian terkait pengelolaan keuangan desa telah dilakukan. Topik penelitian yang dipilih juga sangat beragam, misalnya tata kelola keuangan desa (Astuti & Yulianto, 2016; Wahyudi & Pancawati, 2018); akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa (Ferarow & Suprihanto, 2018; Kumalasari & Riharjo, 2016; Sukmawati & Nurfitriani, 2019); sistem keuangan desa (Arfiansyah, 2020; Malahika, Karamoy & Pusung, 2018; Rivan & Maksum, 2019); kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa (Fitria & Wibisono, 2020; Rulyanti, Sularso & Sayekti, 2018); faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa (Arthana, 2019; Rulyanti, Sularso & Sayekti, 2018); kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Desviana, Basri & Nasrizal, 2020; Saputra, *et al.*, 2019). Beberapa riset tentang permasalahan desa dilakukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan keuangan desa (Basril, Marianti & Rofika, 2021; Rulyanti, Sularso & Sayekti, 2018). Selain itu, Astini, Fauzi & Widowati. (2019) menyebutkan bahwa hambatan dalam pengelolaan keuangan desa adalah keterbatasan sumber daya manusia, system informasi yang belum memadai, dan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa yang belum lengkap. Penelitian Astini, Fauzi & Widowati. (2019); Rulyanti, Sularso & Sayekti. (2018) menguji hubungan sebab akibat dari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Berbagai penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa adalah komitmen organisasi, sumber daya manusia, transparansi, akuntabilitas, regulasi, dan system informasi. Berdasarkan analisis pada penelitian terdahulu, sedikit sekali penelitian yang membahas permasalahan desa di masing-masing bidang dan sub bidang pembangunan desa.

Keadaan Desa, Masalah dan Risiko Desa

Untuk membuat perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa yang baik, maka pelaksana pengelolaan keuangan desa harus melakukan pengkajian keadaan desa terlebih dahulu (Sukriono, 2021; Wiguna, Dewi & Angelia, 2017). Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, potensi risiko dan informasi lain yang dapat menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa (Pemandagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa) (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa adalah tahap perencanaan. Perencanaan pembangunan desa tertuang dalam RPJMDes. Hal yang melatarbelakangi mengapa desa harus menyusun dokumen perencanaan desa adalah: 1) Perencanaan harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat; 2) Masyarakat perlu terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan desa (partisipatif). Agar perencanaan baik, maka proses perencanaan perlu dimulai dari penggalian masalah dan potensi, menentukan prioritas masalah, menentukan tindakan yang layak, dan membuat rencana kegiatan (Subandi & Musriadi, 2020). Oleh karena itu dokumen RPJMDes harus dibuat dengan baik dan mempertimbangkan masalah dan risiko masyarakat desa.

Analisis masalah dan potensi, menentukan prioritas masalah, menentukan tindakan yang layak, dan membuat rencana kegiatan merupakan hal yang penting karena mempunyai tujuan agar rencana pembangunan desa dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat (Soleh & Rochmansjah, 2014). Instrumen penting yang perlu diketahui dalam perencanaan pembangunan desa adalah apa saja permasalahan dan risiko yang dihadapi desa dan seberapa besar potensi yang dimiliki desa. Selaras dengan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan desa, maka penelitian ini akan memetakan potensi masalah

yang dihadapi desa, sehingga dapat ditentukan bidang, sub bidang dan kegiatan apa saja yang banyak mengalami masalah.

METODA PENELITIAN

Jenis dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan

instrumen daftar parameter bidang, sub-bidang dan kegiatan yang didownload dari Sistem Keuangan Desa. Daftar parameter bidang dan sub-bidang dan kegiatan diperoleh dari Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Daftar parameter bidang, sub-bidang dan kegiatan digunakan untuk menentukan kegiatan dan bidang yang berpotensi mengalami masalah. Adapun tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Tahapan Penelitian



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Gambar 1 menyajikan tahapan penelitian. Izin penelitian diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Klaten. Setelah izin penelitian diperoleh, selanjutnya kami membangun kerja sama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Inspektorat Daerah merupakan aparat pengawas internal pemerintah dimana salah satu tugasnya adalah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan desa. Atas kerjasama antara peneliti dengan Inspektorat Daerah, beberapa data yang digunakan untuk menyusun instrumen penelitian berhasil diperoleh.

Penyusunan instrumen penelitian menggunakan daftar parameter bidang, sub-bidang dan kegiatan yang diperoleh dari sistem pengawasan keuangan desa melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data potensi masalah desa. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran angket daftar bidang, sub bidang dan kegiatan serta catatan lapangan yang dibuat peneliti. Subyek menerima instrumen penelitian dan diminta untuk menentukan bidang, sub-bidang dan kegiatan apa yang berpotensi mengalami masalah. Subyek

memberikan nilai 1-5 (masalah rendah sampai masalah tinggi) pada daftar parameter bidang, sub-bidang dan kegiatan. Data yang sudah diisi oleh subyek selanjutnya akan dilakukan analisis. Analisis data dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai di setiap bidang dan sub-bidang. Skor tertinggi merupakan bidang, sub-bidang dan kegiatan yang mempunyai potensi besar menjadi masalah desa dan berisiko terhadap desa. Dengan demikian, bidang, sub-bidang, dan kegiatan tersebut merupakan prioritas utama yang perlu dimasukkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Angket yang diberikan kepada responden merupakan angket yang berisi parameter bidang dan sub-bidang yang diperoleh dari Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Daftar parameter bidang dan sub-bidang dan kegiatan dipilih karena menjadi dasar pembuatan rencana pembangunan desa dan dasar pelaporan keuangan desa. Responden dikumpulkan dalam sebuah ruangan dan diberikan daftar parameter bidang dan sub-bidang. Responden diberikan pemahaman

tentang penyusunan rencana pembangunan desa (RPJMDes). Untuk mengetahui tingkat pemahaman responden tentang RPJMDes, peneliti memberikan post-test kepada responden. Setelah post-test dilakukan, responden mengisi kegiatan-kegiatan di desa dan mengklasifikasikannya ke dalam bidang dan sub-bidang yang sesuai serta memberikan skor 1-5 (1 berisiko dan bermasalah rendah dan 5 tinggi).

Responden dalam penelitian ini adalah Kaur Umum dan Perencanaan yang ada di Pemerintahan Desa se-Kabupaten Klaten. Kaur Umum dan Perencanaan dipilih sebagai responden karena mempunyai tugas pokok dalam perencanaan desa sekaligus berperan sebagai pelaksana dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap Kecamatan dipilih 2 Kaur Umum dan Perencanaan yang berada di desa dengan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten masuk dalam kategori "berisiko tinggi". Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 52 Kaur Umum&Perencana. Peneliti mendapatkan data peringkat pemeriksaan laporan keuangan desa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Obyek kajian dalam penelitian ini adalah potensi masalah yang dihadapi pemerintahan desa. Potensi masalah dipilih sebagai variabel yang ingin dikaji karena dasar perencanaan pembangunan desa dalam RPJMDes adalah pemetaan masalah, sehingga

rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah desa sesuai dan tepat sasaran.

Analisis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran angket daftar bidang, sub bidang dan kegiatan serta catatan lapangan yang dibuat peneliti. Subyek menerima instrumen penelitian dan diminta untuk menentukan bidang, sub-bidang dan kegiatan apa yang berpotensi mengalami masalah. Subyek memberikan nilai 1-5 (masalah ringan sampai masalah berat) pada daftar parameter bidang, sub-bidang dan kegiatan. Data yang sudah diisi oleh subyek selanjutnya akan dilakukan analisis. Analisis data dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai di setiap bidang dan sub-bidang. Skor tertinggi merupakan bidang, sub-bidang dan kegiatan yang mempunyai potensi besar menjadi masalah desa dan berisiko terhadap desa. Dengan demikian, bidang, sub-bidang, dan kegiatan tersebut merupakan prioritas utama yang perlu dimasukkan dalam perencanaan pembangunan desa.

HASIL

Subjek dalam penelitian ini adalah 52 Kaur Umum dan Perencanaan Desa yang ada di Kabupaten Klaten. Tabel 1. Di bawah ini merangkum karakteristik demografi dari subjek yang meliputi jenis kelamin, usia, dan lamanya bekerja.

Tabel 1. Karakteristik Demografi

	Jumlah	Persentase (%)
Panel A. Jenis Kelamin		
Laki-laki	33	63
Perempuan	19	37
Total	52	100
Panel B. Usia		
15-40	24	46
>40-60	14	26
>60	4	18
Total	52	100
Panel C. Lama Bekerja		
<1 tahun	23	44
>1 – 5 tahun	11	22
>5 tahun	18	34
Total	52	100

Masalah dalam penelitian ini akan diidentifikasi berdasarkan bidang, sub bidang dan kegiatan. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang ada pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Tabel 2 menyajikan analisis permasalahan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Analisis permasalahan dibagi ke dalam sub bidang dan kegiatan. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai potensi masalah terbesar yang berhubungan dengan: 1) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; 2) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (lihat Tabel 2). Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistika dan Kearsipan mayoritas masalah berhubungan dengan penyusunan/ pendataan/pemutakhiran profil kependudukan dan potensi desa. Sedangkan pada Sub Bidang Tata Praja

Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mayoritas masalah berhubungan dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa dan penyusunan dokumen keuangan desa.

Lebih jauh lagi, penelitian ini menganalisis seberapa besar dampak masalah pada masing-masing kegiatan. Untuk mengetahui seberapa besar dampaknya, peneliti menggunakan empat kriteria, yaitu: 1) Apakah permasalahan tersebut dirasakan oleh Masyarakat secara luas, 2) Apakah masalah tersebut berdampak secara luas, 3) Apakah masalah tersebut mempengaruhi pendapatan keuangan Masyarakat, 4) Seberapa sering masalah tersebut terjadi. Berdasarkan empat kriteria tersebut, responden diminta untuk memberikan skor 1-5 (1 berdampak rendah, 5 berdampak tinggi). Rerata skor dampak pada masing-masing sub bidang dan kegiatan tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rincian dan Deskripsi Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No	Sub Bidang dan Kegiatan	Jumlah Masalah	Rerata Skor Dampak	Deskripsi Permasalahan	
01	01	Sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, dan Penyelenggaraan Tunjangan atau Operasional dari Pemerintahan Desa		5	
01	01	04	2	2,75	Operasional Pemerintah Desa belum maksimal
		07	2	2,5	Penyediaan Operasional RT/RW
		95	1	3,25	Bantuan Insentif Tenaga Kerja
01	02	Sub Bidang Sarana-Prasarana		4	
		01	3	2,75	Kurang memadainya fasilitas di Baldes; loket pelayanan; laptop
		03	1	3,25	Ruang rapat bising membuat tidak focus
01	03	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Kersipan, Statistik dan Pencatatan Sipil		17	
		01	1	4,5	Banyaknya Pelayanan yang harus dilaksanakan Oleh Perangkat Desa
		02	8	3,19	SDG's Desa, data tidak valid, profil desa,
		03	1	2,75	Administrasi PBB belum tertib

	05	Analisis dan Pemetaan Kemiskinan Desa (secara partisipatif)	7	3,64	Analisis Kemiskinan Desa
01	04	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Sistem Perencanaan, dan Sistem Pelaporan Keuangan	12		
	01	Penyelenggaraan Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes., yang bersifat regular dan Pembahasan APBDes	3	3,83	Partisipasi dan aspirasi masyarakat belum ditampung,
	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes) dan Pembahasannya	1	4,25	Penyusunan RKPDes
	04	Penyusunan dan Pembahasan Dokumen Keuangan Desa	3	4,9	Penyusunan Dokumen APBDes; banyaknya belanja desa
	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1	2,00	Inventarisasi Aset Desa
	07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2	3,00	Penyusunan Laporan dan Informasi Kepada Masyarakat; Penyusunan LPPD, IPPD, LPKD
	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	3,75	Sulitnya Akses internet didaerah pedesaan
	09	Koordinasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan instansi lain	1	2,00	Kurang harmonisnya ketua BPD dengan Pemerintah Desa

PEMBAHASAN

Analisis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa rerata skor dampak tertinggi bernilai 3,25, yaitu berhubungan dengan penyediaan insentif atau honorarium untuk pembantu tugas umum desa. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa terdapat masalah yang berhubungan dengan dana untuk kegiatan operasional pembantu pemerintahan desa seperti honor untuk pengurus RT/RW. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ada keterbatasan penghasilan tetap yang diperoleh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan pengurus RT/RW (Sucipto, 2021).

Masalah tentang penyusunan/pendataan/permutakhiran profil kependudukan dan potensi desa sangat penting untuk dikaji (Hajar, Tanjung & Yenni, 2018; Supandi, Saefuddin & Sulvianti, 2020). Kebutuhan data yang akurat tentang kependudukan dan potensi desa dapat digunakan sebagai pembanding, terlebih setelah adanya Dana Desa (Hulu, Harahap & Nasution, 2018). Data kependudukan dan potensi desa yang valid dapat memberikan informasi mengenai keefektifan penggunaan

Dana Desa. Ada atau tidaknya perubahan data kependudukan dan potensi desa pasca menerima Dana Desa merupakan bukti nyata dari keberhasilan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa. Pengkajian data kependudukan dan profil desa tentunya dikaitkan dengan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomis desa.

Selanjutnya, masalah tentang penyelenggaraan musyawarah desa. Penyelenggaraan musyawarah desa (Musdes, Musrenbangdes) merupakan salah satu proses dalam perencanaan pembangunan desa yang melibatkan unsur masyarakat secara partisipatif (Sofyani, *et al.*, 2020). Timbul pertanyaan yang perlu direnungkan terkait musyawarah desa yang dilaksanakan secara partisipatif, yaitu apakah musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat mampu merumuskan sebuah pembangunan desa yang berkelanjutan. Masalah yang berhubungan dengan musyawarah desa yaitu tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditampung. Namun, terlepas dari tidak dapat ditampungnya semua aspirasi masyarakat, proses musyawarah yang dilakukan adalah mufakat. Dengan kata lain ada

kesepakatan bersama dan pertukaran argumentasi dalam musyawarah terjadi dalam ruang masyarakat desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah desa berdasarkan bidang, sub bidang dan kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, bidang yang paling sering mengalami permasalahan (mulai yang paling banyak) adalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Selanjutnya, jika masing-masing bidang tersebut diidentifikasi maka akan menghasilkan sub bidang mana yang mengalami masalah. Berdasarkan hasil penelitian, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai potensi masalah yang berhubungan dengan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan; dan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Jika dianalisis pada masing-masing kegiatan, maka yang bermasalah dalam pengelolaan keuangan desa khususnya tahap perencanaan dan penganggaran yaitu kegiatan sebagai berikut ini: penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil kependudukan dan potensi desa; penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa dan penyusunan dokumen keuangan desa; perlunya penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.

Ketebatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Penelitian ini baru melakukan analisis pada level seberapa banyak masalah yang muncul, baik berdasarkan bidang, sub bidang dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan bobot besarnya dampak pada setiap bidang, sub bidang dan kegiatan. Dampak yang akan dianalisis dapat mempertimbangkan seberapa besar bidang, sub bidang atau kegiatan mempengaruhi masyarakat secara luas, seberapa besar berdampak pada pendapatan masyarakat, seberapa sering masalah itu terjadi. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan analisis faktor pada seluruh kegiatan, sehingga dapat dibentuk variabel baru sebagai determinan dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 67–81.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1), 67–81.
<https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1–21.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43.
<https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati. (2019). Determinan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(1), 29–47.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Basril, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50.
<https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2), 219–228.
<https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>
- Desviana, Basri, Y. M., & Nasrizal. (2020). Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 50–73.
<https://doi.org/10.21632/saki.3.1.50-73>
- Ferarrow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69.
<https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Fitria, N., & Wibisono, N. (2020). Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 85.
<https://doi.org/10.33021/jaaf.v3i2.808>
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). Empowerment of Coastal Community Through Village

- Potential. *Proceedings Of The International Conference On Public Policy, Social Computing And Development 2017 (ICOPOSDEV 2017)*, 141(6), 297–299.
<https://doi.org/10.2991/icoposdev-17.2018.61>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14–25.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa* (pp. 1–34).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri.No.20.TH.2018+Lampiran.pdf>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273–288.
<https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3(2), 92–107.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210–229.
- Rivan, A., & Maksam, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92–100.
<http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Roza, D., & S, L. A. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*,

- 4(3), 606–624.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(3), 323–335.
<https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6474>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
<http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Sofyani, H., Simali, M. F. I. S., Najda, T., & Al-maghrebi, M. S. (2020). The Role of Budgetary Participation and Environmental Uncertainty in Influencing Managerial Performance of Village Government. *Journal of Accounting and Investment*, 21(2).
<https://doi.org/10.18196/jai.2102148>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Subandi, M., & Musriadi. (2020). Evaluation of Rural Development Planning (Rpjmdes and Rkpdes). *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 9(1), 81–95.
<https://doi.org/10.333884/jimupb.v9i1.2719>
- Sucipto, A. (2021). Evaluasi Alokasi Dana Desa (Add) Tentang Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Desa Kalisemo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. *Progress: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 26(2), 75–94.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Sukriono, D. (2021). Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewaeaganegaraan*, 6(1), 92–100.
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, Hasibuan, A. F. H., Silitonga, H. P., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Kita Menulis.
- Supandi, A., Saefuddin, A., & Sulvianti, I. D. (2020). Two step Cluster Application to Classify Villages in Kabupaten Madiun Based on Village Potential Data. *Xplore: Journal of Statistics*, 10(1), 12–26.
<https://doi.org/10.29244/xplore.v10i1.272>
- Wahyudi, A., & Pancawati, R. S. (2018). Keharmonisan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Journal of Research and Applications Accounting and Management*, 3(2), 131–144.
<https://doi.org/10.18382/jraam.v3i2.131>

- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41–52. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v6i2.2511>
- Zuliyah, S. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2), 151–160.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).